

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana terhadap pembeli konten pornografi melalui media elektronik. Rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang pornografi menurut perspektif hukum positif Indonesia? Bagaimana pengaturan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pembeli konten pornografi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini tentang Peraturan tentang Kesusilaan, Pornografi, dan Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat kekosongan hukum yang dimana dari ketiga undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali tentang pelaku pembeli konten yang bermuatan asusila atau pornografi. Disisi lain, tindakan membeli konten pornografi apabila dilihat dari teori-teori hukum yang ada, merupakan suatu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan suatu hal yang bertentangan dengan aturan yang ada, pada dasarnya pembeli konten pornografi tersebut menjadi sebab akibat seseorang ingin membuat video-video atau foto-foto yang bermuatan asusila tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Peraturan mengenai kesusilaan maupun pornografi dianggap tidak sampai pada tujuan pembentukan aturan Perundang-Undangan tersebut, yang dimana tujuan tersebut untuk memberikan perlindungan, pendidikan moral dan akhlak serta kepastian hukum yang melindungi warganegara, mencegah dan menghentikan berkembangnya komersialisasi seks dan eksploitasi seksual. oleh karena itu Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan dan pornografi yang berlaku di Indonesia perlu dilakukan direvisi atau pembaharuan untuk memperjelas atau menutupi kekosongan hukum tentang sanksi bagi setiap orang yang melakukan pembelian konten yang bermuatan kesusilaan dan pornografi.

**Kata kunci:** *Kebijakan Hukum, Pornografi, Media Elektronik, Pembeli Konten, Kriminalisasi.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine criminal law policies against purchasers of pornographic content through electronic media. What is the formulation of the problem regarding pornography according to the perspective of Indonesian positive law? How is the regulation of criminalization policies against perpetrators buying pornographic content based on the Laws and Regulations. The results of this study regarding the Regulations on Decency, Pornography, and Information and Electronic Transactions, there is a legal vacuum in which the three laws do not regulate at all the perpetrators of buying immoral or pornographic content. On the other hand, the act of buying pornographic content when viewed from existing legal theories, is a criminal act that jointly does something contrary to existing rules, basically the buyer of pornographic content becomes the cause and effect of someone wanting to make videos or photos that are charged with immorality to make a profit from the sale. Regulations regarding decency and pornography are considered not to be up to the purpose of establishing the legislation, which is to provide protection, moral and moral education as well as legal certainty that protects citizens, prevents and stops the development of the commercialization of sex and sexual exploitation. therefore, the law relating to the criminal act of decency and pornography in force in Indonesia needs to be revised or updated to clarify or cover up the legal vacuum regarding sanctions for everyone who purchases content that contains decency and pornography.*

**Keywords:** *Legal Policy, Pornography, Electronic Media, Content Buyers, Criminalization.*